

BUDAYA LOKAL DAN HEGEMONI NEGARA DALAM ‘KELOMPOK BUDAYA MACAPATAN’ SEBAGAI SARANA LEGITIMASI POLITIK ORDE BARU

Suparlan Al Hakim

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: Discourse politics in socio-cultural and political analysis often raise debates. The debates come out in terms of the positioning of local culture products when they are communicated with the concepts of statesmanship/nationalism. In this case, it can bring a shift from a local culture concept to the political one. If it happens, the state tendency in controlling local cultures is bigger. It is due to the desire of the state/government to get its legitimacy and strengthen its hegemony latently. The emergence of a local culture group “*macapatan*” in Trenggalek indicates that there is a practice of hegemony of *Orde Baru* (social-political order in Indonesia since 1966-1998). Using qualitative research, the hypothesis is proved, beginning from the establishment of the *macapat* club “*Pama-Pami*” to the persistence of *macapatan* culture. Moreover, the materials used in *tembang macapat* show the hegemony of *Orde Baru*. However, the existence of *macapatan* club in Trenggalek seems to have positive meanings for the society as the culture agents.

Abstrak: Politik wacana dalam analisis sosial-budaya dan politik sering menghadirkan perdebatan dalam pemosisian produk budaya lokal ketika dikomunikasikan dengan konsep kenegaraan (kebangsaan). Bisa jadi hal demikian, akan menimbulkan pergeseran konsep budaya lokal yang berubah menjadi konsep politik. Jika hal ini terjadi, kecenderungan negara dalam mengontrol budaya lokal akan lebih besar lantaran adanya keinginan negara (pemerintah) untuk meraup legitimasi dan secara laten untuk memperkuat hegemoninya. Kasus munculnya, kelompok budaya *macapatan* di Trenggalek mengindikasikan adanya praktik hegemoni negara Orde Baru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hipotesis itu terbukti mulai dari pembentukan paguyuban *macapatan* “*Pama-Pami*” sampai dengan berlangsungnya budaya *macapatan*. Bahkan materi *tembang macapat* yang digunakan nampak adanya hegemoni negara Orde Baru. Sekalipun demikian, kehadiran kelompok budaya *macapatan* di Trenggalek, dirasakan memiliki makna positif bagi masyarakat sebagai pelaku budaya (*agency*).

Kata Kunci: budaya lokal, hegemoni, *macapatan*, Orde Baru

“Gebrakan baru” kebangkitan ‘seni budaya *macapat*’ di Trenggalek pada tahun 1986, ditengarai menjadi indikator adanya praktik hegemoni negara. Lebih menarik, fenomena sosial budaya itu, muncul bersamaan waktunya dengan program sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) di era Orde Baru. Fenomena di kala itu, boleh jadi mengundang sebuah prediksi tentang praktik hegemoni negara Orde Baru terhadap seluruh potensi budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Negara menempatkan posisinya di atas warga negaranya melalui kepemimpinan politik, kultural dan moral serta intelektual.

Jika prediksi itu benar, fenomena munculnya kembali seni *tembang macapat* dalam wacana politik dan budaya pada masa Orde Baru, paling tidak juga mengundang beberapa penafsiran. *Pertama*, menunjukkan semakin kuatnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan kenegaraan dewasa ini dalam konstelasi politik kenegaraan; *kedua*, menunjukkan adanya perhatian negara untuk lebih memberdayakan potensi budaya rakyat (lokal) dalam menyiapkan masyarakat yang mandiri; dan *ketiga*, menunjukkan semakin perkasanya negara dalam menguasai warga negara terutama dalam memanfaatkan budaya rakyat sebagai ‘instrumen’ kelangsungan ideologi dan legitimasi kekuasaan negara.

Di samping penafsiran tadi, munculnya 'babak baru' perhatian negara terhadap seni *tembang macapat*, sekaligus dapat digunakan dalam menepis suatu anggapan bahwa membicarakan budaya rakyat yang tradisional tidak ada relevansinya dengan era negara modern. Bahkan, kajian itu sering membawa pada 'arena' perdebatan dalam analisis sosial-budaya, apakah mengkaji *tembang macapat* sebagai produk budaya lokal dalam bentuk sastra Jawa lisan dan tradisional masih relevan dengan transnasional dewasa ini. Persoalan lain, apakah membahas seni tradisional dalam bentuk *tembang macapat* dapat digunakan dalam menerjemahkan fenomena, realitas dan perubahan sosial dewasa ini. Persoalan itu mengundang kajian untuk menempatkan posisi budaya tradisional (baca: *tembang macapat*) dalam konteks sosial tersendiri terutama ketika budaya tradisional itu dipersandingkan dengan produk budaya daerah-daerah lain dalam konteks kehidupan kebangsaan (negara). Damono (1978:1) menegaskan bahwa sastra lisan memiliki fungsi sosial tersendiri bagi masyarakat pendukungnya, terutama ketika sastra lisan tersebut dimainkan atau dilisankan. Sastra lisan merupakan sebuah 'lembaga sosial' yang menggunakan bahasa sebagai 'medium', dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sedangkan dalam konteks kebangsaan, fungsi sosial *tembang macapat* (sebagai budaya lokal) bagi kehidupan bangsa Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kekayaan kebudayaan nasional, yang sejajar posisinya dengan kebudayaan lokal atau daerah di seluruh nusantara.

Realitas sosial *tembang macapat* di kalangan masyarakat Jawa, yang diekspresikan melalui kegiatan *nembang* (melagukan *tembang macapat* yang meliputi: *Mijil; Maskumambang, Sinom; Asmarandana; Kinanthi; Durma; Dhandhanggula; Gambuh; Pangkur; Megatruh* dan *Pucung*), diperkirakan masih digemari oleh suku bangsa yang menggunakan sejak dahulu, walaupun disadari sekarang menunjukkan gejala penurunan. Hal ini disadari juga oleh Hastanto (1986:106); dia menggambarkan kondisi perkembangan *macapat* di sekolah-sekolah Yogyakarta tahun 1950-an sangat berbeda dengan kondisi ketika dia memaparkan tulisannya. Pengakuan yang mirip, juga disampaikan oleh Ayip Rosidi (Dialog Prisma Nomor 2, 1979). Lantaran komitmennya dengan

budaya lokal, sampai-sampai dia melontarkan pernyataan yang agak sinis, masalah kebudayaan daerah harus digali oleh orang daerah sendiri; orang asing sering kacau dalam menginterpretasi tentang kesenian kita. Kendatipun mereka terlatih dalam hal metode dan sistematika, tetapi mereka gagal dalam menafsirkan maknanya. Berbeda dengan Sutan Takdir Alisyahba, sekalipun juga mencintai kebudayaan daerah, dia menegaskan bahwa kebudayaan daerah dan nasional sekarang haruslah bersumber pada ilmu.

Masalah yang urgen, bagaimana menempatkan seni *tembang macapat* dalam konteks kenegaraan (atau meminjam istilah Sutan Takdir 'kosmopolitan ilmu') dalam kehidupan dunia? Untuk menjawab persoalan ini, kiranya diperlukan adanya definisi kebudayaan nasional secara jelas yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional bagi siapa saja yang menekuninya. Hal ini menunjukkan bahwa soal kebudayaan tidak saja merupakan tugas bagi para ahli kebudayaan atau peneliti sosial; dan bukan juga hanya konsep seniman dan para budayawan, melainkan juga tanggungjawab para eksekutif dan kaum politisi. Setidaknya, persoalan kebudayaan mampu mencerminkan identitas sebuah bangsa yang telah menegara. Kenyataan ini mengharuskan kebijakan tentang kebudayaan harus dikembalikan pada rujukan untuk mengembangkan identitas bangsa. Senada dengan ini, Lindsay (1995:567-68) mengilustrasikan bahwa kebijakan budaya dan seni (*performing arts*) di negara-negara Asia Tenggara (misal Malaysia, Philipina dan Indonesia) selalu dimasukkan dalam terminologi 'pembangunan identitas nasional' (*national identity building*).

Dalam kasus Indonesia, konsep kebudayaan nasional hendaknya diartikan sebagai sebuah hasil konstruksi nasional dari kenyataan empirik budaya daerah yang ada di seluruh nusantara. Secara demikian, persoalan budaya nasional menjadi penting untuk dimasukkan sebagai agenda kehidupan nasional, yang sebagian menjadi tanggungjawab pemerintah (negara). Sekalipun demikian, ketika persoalan kebudayaan nasional sering dimasukkan dalam konteks kebangsaan, bisa berubah penanganan kebudayaan menjadi argumen politik pemerintah. Berkaitan dengan kasus ini Emersen (dalam Kleden, 1987:217) menegaskan adanya persimpangan antara konsep kebudayaan politik (*political culture*) dan politik kebudayaan (*cultural politics*). Kebudayaan

politik, menjadi orientasi budaya kelompok elite politik yang menentukan politik mereka sendiri; sedangkan politik kebudayaan menunjuk pada kenyataan di mana perbedaan-perbedaan kebudayaan diperpolitikkan dan perbedaan politik diungkapkan dalam idiom-idiom kebudayaan.

Gejala ini telah nampak semenjak perintah Orde Lama dan Orde Baru. Tidak adanya kejelasan konsep kebudayaan pada masa ORLA dan kepribadian bangsa masa ORBA, akan menggeser interpretasi budaya yang 'alami' ke arah definisi dan interpretasi politik. Kondisi demikian, juga berakibat semakin tidak jelasnya posisi hubungan kebudayaan nasional dengan kebudayaan lokal. Akibatnya, konsep kebudayaan nasional berkembang menjadi isu politik dan lebih banyak digunakan sebagai norma politik (*political norm*). Penempatan ideologi Pancasila sebagai 'kristalisasi' nilai-nilai budaya bangsa kiranya dapat digunakan sebagai contoh yang sangat jelas bahwa isu kebudayaan bergeser menjadi isu politik politik yang sangat 'sakral'. Lebih parah lagi, ketika keluar Ketetapan Nomor II/1978 tentang P-4; serta merta bangsa Indonesia digiring untuk memiliki kesamaan bertindak untuk mengamalkan Pancasila.

Bersamaan dengan itu, di Trenggalek melalui pemerintah daerah lewat Depdikbud dan BP-7 (waktu itu), masyarakatnya diwajibkan untuk mendirikan kelompok kesenian *macapatan* yang materi *tembang*-nya harus memuat pesan nilai-nilai Pancasila dan P-4. Himbauan ini, kiranya bukan sekadar alasan, karena sistem negara Orde Baru dalam melakukan sosialisasi P-4 menempuh teknik dan media, yang salah satunya melalui seni tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru telah melembagakan kekuasaannya dalam sebuah proses negoisasi antara tiga kecenderungan utama, yakni totaliterisme politik, konstitusionalisme plus legalisme dan keberagaman budaya. Proses negoisasi yang demikian, oleh Lidle (dalam Latif 1996:226) digambarkan sebagai legitimasi simbolik dan instrumental.

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian ini diharapkan mampu menjawab atas persoalan "Bagaimana Hegemoni Negara Orde Baru Terhadap Budaya Lokal *Macapatan* di Trenggalek". Penggambaran praktik hegemoni Orde Baru terhadap budaya *macapatan* tersebut, dapat dilakukan lewat: (1) pelaksanaan budaya *macapatan* yang dilakukan masyarakat

Trenggalek; (2) jenis-jenis *tembang macapat* yang digunakan; (3) tema-tema sosial yang diangkat dalam praktik budaya *macapatan*; (4) peran elite pemerintahan dan elite seni dalam kegiatan *macapatan*; dan (5) melalui tanggapan komunitas seni dan masyarakat terhadap praktik budaya *macapatan*.

Penelitian ini mengandung tema sentral, mengenai hubungan antara 'Masyarakat dan Negara'. Sedangkan secara khusus, penelitian difokuskan pada proses dialektik tentang 'budaya lokal dan hegemoni negara'. Kajian komponen budaya lokal dikonsentrasikan terhadap keberadaan 'kelompok budaya *macapatan*' dalam hubungannya dengan negara (pemerintah) terutama pada era Orde Baru di masa jayanya dahulu.

Kejatuhan rezim Orde Baru, sebenarnya patut dipertanyakan, apakah rezim ini benar-benar telah jatuh? Bukankah hal itu hanya nampak secara fisik semata, sedangkan 'roh'-nya masih gentayangan? Dahulu, ketika Orde Baru berada pada 'puncak gemilang', banyak diloyali oleh para elite pemerintahan dan politik serta disegani oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun sekarang, suasana telah berbalik. Bukan pujian yang muncul, akan tetapi justru banyak 'umpatan' dengan nada negatif. Para elite berubah mengkritisi, rakyat menjadi antipati, dan bahkan di berbagai kalangan tidak jarang memberikan vonis Orde Baru sebagai 'pengkhianat bangsa', 'penindas rakyat', 'pengkhianat demokrasi', 'sarang KKN, dan sebangsanya.

Apakah yang menyebabkan semuanya itu? Karena Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang 'hegemonik' yang memanfaatkan kepatuhan rakyat demi kepentingan pemerintah. Pengalaman pahit bangsa Indonesia, lewat 'panggung politik' pemerintah Orde Baru, mengharuskan bangsa Indonesia menyusun format baru untuk menghapus praktik hegemoni negara yang menempatkan masyarakat (rakyat dan warga negara) pada posisi yang lemah. Melalui pemerintahan 'hegemoniknya', Orde Baru telah berhasil memposisikan dirinya sebagai supremasi kelas yang mampu mendominasi masyarakat dan menempatkannya sebagai obyek pemerintahan (kekuasaan). Pola pemerintahan Orde Baru memang sangat kental dengan konsep hegemoni, yaitu kepemimpinan intelektual dan moral (Sparringa, dalam Susilo, 1997:56). Sementara itu, konsep hegemoni yang biasa dielaborasi dari An-

tonio Gramsci, banyak merujuk pada situasi dan praktik sosial masyarakat yang menyatu dalam konsensus (Patria, 1999:12). Kembali Sparringga menegaskan, bahwa hegemoni jelas bukan semata-mata, dan lebih canggih dari dominasi; individu menerima gagasan dari sebuah rezim bukan karena paksaan.

Penerimaan masyarakat atas gagasan pemerintah (rezim penguasa) yang kemudian digunakan sebagai rujukan bertindak, jelas akan berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Itulah sebabnya, pemerintah sangat aktif dalam membangun kesadaran rakyat untuk berterima dengan gagasan negara (penguasa), agar legitimasi masyarakat terus mengalir kepadanya. Dalam kaitan ini Ramlan Surbakti (1992:96), mengatakan bahwa upaya untuk memperoleh legitimasi dapat melalui cara-cara simbolik, prosedural dan material. Cara simbolik, dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang pada umumnya berbentuk simbol. Sementara dengan cara prosedural melalui pemilihan umum, dan cara material dalam bentuk janji-janji untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Dalam tataran simbolik, bahasa menempati posisi kuat dengan konsep legitimasi dan hegemoni. Bahkan, bahasa merupakan sarana penting untuk melayani hegemoni (Patria, 1998:127). Hal ini juga dikuatkan oleh Sparringa, bahwa politik bahwa telah menjadi salah satu faktor penting dalam meletakkan dasar-dasar hegemoni Orde Baru. Melalui arena diskursus, rezim ini tampil sebagai sebuah orde yang berhasil meletakkan sebuah kepemimpinan moral dan intelektual (baca: hegemoni) yang luar biasa tangguh.

Dalam hubungan itu, *tembang macapat* yang bentuk dominannya adalah sebuah wacana 'bahasa Jawa', yang di dalamnya terdapat permainan bahasa, pada dasarnya sangat rentan dengan hegemoni. Melalui cara inilah, Orde Baru mampu memanfaatkan basis-basis kultural lewat produk budaya-budaya lokal, yang ditumpangi oleh ideologi, kekuasaan dan kepentingannya.

Dengan memanfaatkan kajian teoretik sebagai faktor yang mengitari (misalnya teori legitimasi, teori simbol budaya, teori kelas sosial dan teori korporatisasi), maka pendekatan teoretik yang digunakan dalam penelitian adalah ini adalah teori 'strukturasi' sebagaimana dikembangkan oleh Anthony Giddens. Alasan penggunaan teori ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan budaya *macapatan* dalam konteks penelitian ini dipandang sebagai 'praktik sosial' di mana di dalamnya terjadi hubungan yang bersifat 'dualitas' antara struktur dan agensi. Kajian tentang makna praktik sosial dan dualitas struktur ini dapat dirujuk antara lain pada (Giddens, 1984:2; Giddens, 1984:24; Giddens, 1979:69; Ritzer, 1996:529; dan Cassel, 1993:123).

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan jenis studi yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam 'studi kasus', yaitu kasus sebuah desa di masyarakat Jawa (desa Malasan) yang memiliki tradisi budaya *macapatan* yang kelompoknya dibentuk oleh pemerintah Orde Baru.

Jenis studi kasus yang dikaji dalam penelitian ini, adalah perpaduan antara *historical-organization case studies* dan *observasional case studies*. Sebagian besar kajian kasus, lebih banyak difokuskan pada penerapan jenis kedua; namun dalam beberapa hal (misalnya mengenai sejarah berdiri dan tokoh 'cikal-bakal' *macapatan*) digunakan studi kasus jenis pertama.

Melalui kerja kualitatif di atas, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Sebuah desa yang memiliki latar geografis dan sosial budaya serta politik dengan wilayah kecamatan dan kabupaten. Keunikan sebagai sasaran studi kasus desa lokasi penelitian, karena desa Malasan memiliki potensi-potensi antara lain sebagai desa seni, sebagai desa percontohan kebersihan lingkungan dan rutinitas dan kekhasan melaksanakan budaya *macapatan*.

Kendati, lokasi penelitian dilakukan di tingkat desa, namun subyek terteliti dipilih tidak saja dari *pandhemen* (penggemar dan peserta) budaya *macapatan*, akan tetapi juga para elit pemerintahan, elite seni, profesi dan masyarakat sekitar di luar peserta *macapatan*. Komunikasi dengan informan kunci ini, diharapkan dapat memperoleh data yang direncanakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dija-ring lewat kegiatan *macapatan* antara lain: (1) data

proses hubungan antara pemerintah dan peserta *macapatan*; (2) data proses penyusunan *tembang macapat*; (3) data pilihan kelompok *macapatan* menggunakan jenis *tembang macapat*; (4) data pandangan anggota kelompok *macapatan*; (5) data tentang peran elite dalam kegiatan *macapatan*; dan (6) data tentang sejarah desa Malasan. Sedangkan data sekunder, berupa: (1) dokumen naskah jenis *tembang* dan *cakepan macapat*; (2) dokumen sejarah kabupaten Trenggalek dan kecamatan Durenan. Data tersebut dikoleksi dengan menggunakan teknik observasi proses budaya *macapatan*, wawancara secara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumentasi sekitar naskah *tembang* dan sejarah berdirinya kabupaten Trenggalek dan kecamatan Durenan.

Dengan memperhatikan karakteristik data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 'model interaktif' dengan melibatkan tiga komponen: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga langkah analisis data tersebut, pelaksanaannya dipadu dengan teknik 'analisis tema' yang dikonstruksi berdasarkan kajian taksonomik, domein dan komponensial, sebagaimana diadaptasi dari James P. Spradley (1997:249-74).

Selanjutnya, data yang telah dianalisis diungkapkan dengan menggunakan dua cara. *Pertama*, dengan cara 'narasi', dalam arti sesuai dengan penuturan informan sekitar praktik budaya *macapatan*; dan *kedua*, dengan adalah teknik 'konstruksi' dengan menggunakan bahasa peneliti. Teknik narasi digunakan untuk mempertahankan keaslian penuturan setempat (*native*) dan teknik konstruksi ini digunakan untuk keperluan komunikasi pada lingkup yang lebih luas, tidak saja masyarakat Jawa, akan tetapi juga komunitas di luar Jawa serta kalangan akademisi.

HASIL

Praktik Budaya *Macapatan*

Kegiatan *macapatan* diselenggarakan lewat sebuah kelompok budaya *macapatan* 'Pama-Pami'. Budaya *macapatan* ini dilandasi oleh asas SASIPAT, yang berarti *Sarasehan Sinawung Tembang Macapat*, yang menekankan pada unsur 'diskusi'. Kegiatan yang dilaksanakan di rumah-rumah peserta yang digelar berdasarkan

'undian' lewat arisan ini, dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 20.00 - 24.00, dengan memainkan peran-peran yang telah ditetapkan. Peran-peran yang dimaksud: *sesepeuh macapat* (penanggungjawab); *dhalang tembang* (yang memimpin jalannya *macapatan*); *pamaca tembang* (membaca atau melantunkan tembang); *pamireng tembang* (pendengar); *pamedhar tembang* (penerjemah pesan tembang); *pangudhal tembang* (pembahas dengan konteks sosial). Dengan posisi *lèsèhan* (duduk di alas) atau di kursi dengan sistem *garingan* (tanpa musik *gamelan*), mereka melakukan peran sesuai dengan tugas masing-masing-masing.

Jenis *Tembang Macapatan* yang Digunakan

Tembang macapat yang digunakan dalam budaya *macapatan* di Trenggalek sesuai dengan jumlah *tembang macapat* sebanyak sebelas. Dilihat dari popularitas *tembang macapat* yang digunakan, *Dhandhanggula* menempati urutan pertama; berikutnya *tembang Mijil* menempati urutan kedua. Selanjutnya urutan ketiga, ditempati oleh *tembang Sinom* dan *Kinanthi*; yang disusul oleh *tembang Pucung* pada urutan keempat; berikut urutan kelima, *tembang Pangkur*, *Mégatruh* dan *Maskumambang*; sedangkan terakhir, adalah *tembang Gambuh* dan *Durma*.

Tema-tema Sosial yang Diangkat dalam Budaya *Macapatan*

Dari hasil analisis dapat diidentifikasi ke dalam empat belas tema, yaitu: (1) tema ajaran moral, budi pekerti dan agama; (2) tema ritual dan pembebasan; (3) tema politik (pengakuan kekuasaan); (4) tema peningkatan mutu pendidikan; (5) pariwisata lokal; (6) tema legitimasi elite lokal dan nasional; (7) tema keluarga berencana; (8) tema ideologi Pancasila dan P-4; (9) tema proklamasi kemerdekaan; (10) tema konstitusi atau UUD 1945; (11) tema kritik sosial; (12) tema petuah temanten atau keluarga; (13) tema pandangan dunia kehidupan; dan (14) tema rekreasi dan tebakan.

Peran Elite dalam Budaya *Macapatan*

Kegiatan *macapatan* di Trenggalek tidak dapat dipisahkan dengan peran elite lokal, regional dan nasional. Peran yang dimaksud meliputi: (1)

pembentukan kelompok budaya *macapatan*; (2) kegiatan ‘safari *macapat* P-4 ke seluruh desa-desa di Trenggalek; (3) penyusunan naskah *tembang macapat*; dan (4) pengawasan dalam bentuk ‘kunjungan’ ke kelompok-kelompok *macapatan*.

Beberapa Tanggapan

Berbagai tanggapan yang muncul atas kehadiran kelompok budaya *macapatan* di Trenggalek pada dasarnya masyarakat diterima oleh kalangan elite dan warga masyarakat itu sendiri. Praktik budaya *macapatan* dirasakan memberikan manfaat tersendiri, di kalangan elite dapat digunakan sebagai media sosialisasi program pemerintah baik nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, terutama berkaitan dengan sosialisasi P-4 dan pembangunan. Sedangkan dari kalangan warga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan budaya *sonjo* (anjang sana), bersilaturahmi, tukar pikiran dan mencari berita dinamika jaman. Tidak kalah penting, dari kalangan profesi, misalnya guru-guru, dapat digunakan sebagai kegiatan olah pendidikan yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran bahasa daerah Jawa di sekolah. Selain itu, muncul tanggapan yang bernada negatif, misalnya dengan kegiatan *macapatan* justru malah menambah kecemburuan sosial dan konflik psikologis. Hal ini nampak pada beberapa warga yang tidak melanggar kesepakatan penyediaan hidangan seharusnya dilakukan secara *climen* (sederhana) menjadi seakan-akan *jor-joran* (bersaing) untuk mencari pujian.

PEMBAHASAN

Posisi Temuan Penelitian dalam Konteks Budaya Jawa

Sebagai praktik sosial, budaya *macapatan* menampakkan pola interaksi setempat (lokal), yang kesemuanya hanya dapat dijawab dengan ‘label’ Jawa. Pola-pola ini dapat dibuktikan mulai dari nama yang digunakan, yaitu “Paguyuban *Macapatan Pama-Pami*”, terminologi yang dipakai dalam menyebut komponen peran dalam budaya *macapatan*, bahasa yang digunakan yang seluruhnya menggunakan bahasa Jawa. Barangkali ini ‘simbol’ yang paling gampang untuk mengatakan wajah ‘kejawaan’ dari budaya

macapatan. Di samping itu, secara substansial materi dan tema *tembang macapat* yang digunakan berkaitan dengan nilai-nilai budaya Jawa, antara lain: (1) nilai religius Jawa; (2) nilai filosofis Jawa; (3) nilai etis Jawa; dan (4) berkaitan dengan nilai-nilai estetis Jawa.

Kaitan Tema Budaya *Macapatan* dengan Tema Pemerintahan Orde Baru

Terdapat paralelisme yang signifikan antara keduanya. Misalnya dalam ‘tema ritual’, dengan menggunakan analog ritual budaya Jawa kemudian digunakan sebagai politik Orde Baru yang bernuansa pada tema ritual. Ritual telah memberikan muatan religius bagi setiap gerak langkah politik Orde Baru yang cenderung sebagai ‘pameran kekuatan’ dan ‘instrumen politik’ yang artifisial. Demikian juga tema-tema Orde Baru yang lain, misalnya tema-tema pembangunan nasional, tema stabilitas dan persatuan (integrasi nasional), atau bahkan tema asas tunggal Pancasila, pada dasarnya apabila dikaji secara mendalam memiliki paralelisme dengan nilai budaya Jawa.

Posisi Temuan Penelitian dalam Konteks Hegemoni

Hampir seluruh lintasan kegiatan *macapatan* di Trenggalek tidak sepi dengan hegemoni. Mulai dari proses pembentukan kelompok budaya ini sampai dengan pelaksanaannya dan materi *tembang macapat* yang digunakan serta tema-tema yang diangkat mengandung nuansa campurtangan negara Orde Baru sebagai cerminan pemerintahan yang ‘hegemonik’. Bentuk-bentuk hegemoni Orde Baru terhadap budaya *macapatan* di Trenggalek, dapat diidentifikasi sekitar: (1) penerimaan campuran tangan elite pemerintah (BP-7) oleh elite seni setempat untuk membentuk kelompok *macapatan* P-4; (2) kegiatan ‘Safari *Macapatan* P-4 ke seluruh desa-desa se-wilayah kabupaten Trenggalek; (3) penyiapan naskah *tembang macapat* yang disusun oleh elite BP-7 Pusat, Jawa Timur dan elite seni setempat yang dipraktekkan dalam budaya *macapatan*; (4) kepatuhan aktif untuk menggunakan *tembang macapat* hasil rakitan elite-elite di atas; (5) tidak munculnya reaksi yang bersifat fisik dari masyarakat atau komunitas seni.

Relevansi Temuan Penelitian dengan Teori Strukturasi

Sebagai praktik sosial, budaya *macapatan* di Trenggalek kiranya mampu menggambarkan konsep dan aplikasi teori strukturasi Giddens. Yaitu sebuah teori, yang didasarkan pada premis bahwa ‘dualisme’ harus direkonstruksi sebagai ‘dualitas’ struktur (Giddens, 1984:xxxxi). Artinya struktur dan pelaku tindakan (agensis) tidak dipandang berdiri sendiri, melainkan dua hal yang saling berinteraksi. Dalam praktik budaya *macapatan* ditemukan adanya realitas bahwa struktur, di samping mampu memberikan seperangkat aturan, norma dan nilai-nilai (*rules*), ternyata juga mampu memberikan sumberdaya (*resources*). Struktur yang dimaksud, berupa *tembang macapat*. Seluruh tema-tema sosial yang diangkat melalui *tembang macapat* mampu memberikan aturan, norma dan pedoman nilai bagi peserta *macapatan* untuk melakukan praktik sosialnya yang berlangsung berulang-ulang yang dibingkai oleh ruang dan waktu.

Implikasi Teoretik

Dalam beberapa hal teori hegemoni (Gramscian) dan teori strukturasi (Giddensian) memiliki beberapa perbedaan, namun di sisi lain terdapat kesamannya. Jika dirunut dari latar belakang munculnya, kedua teori itu lahir sebagai reaksi terhadap teori yang sebelumnya. Gagasan munculnya teori hegemoni Gramscian, merupakan cerminan kekecewaannya terhadap praktik paham Marxisme ortodoks; yang banyak mengunggulkan kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai determinan perubahan kehidupan manusia dan memisahkannya dari elemen politik, kebudayaan, ideologi dari sub-struktur produksi (Sugiono, 1999:22). Sementara itu, teori strukturasi (Giddensian), muncul sebagai reaksi dari pertentangan dua kubu teori sosial (Priyono, 1999:48), antara kelompok ‘teori strukturalisme dan struktural-fungsional’ (Karl Marx, Emile Durkheim dan Talcott Parsons) dengan kelompok teori ‘fenomenologi, ethnometodologi dan psikoanalisis’ (Erving Goffman, Alfred Schutz dan Harlord Garfinkel). Sentral persoalan, terletak pada pendirian mereka, kubu pertama memandang keseluruhan berada di atas pengalaman pelaku seseorang; sedangkan kubu kedua memandang pelaku seseorang berada di atas gejala keseluruhan. Dengan kata lain, yang pertama

memandang struktur berada di atas pelaku (*agency*), dan kedua memandang pelaku (*agency*) berada di atas struktur.

Jika dilihat dari substansi pokok kajian kedua teori itu, sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai sarana menjembatani problema teoritik — penguasa vs dikuasai; negara vs masyarakat — dari aplikasi teori sebelumnya. Dalam posisinya sebagai jembatan penyelesaian persoalan kehidupan manusia dan negara itu, ada beberapa varian yang sama namun berbeda titik orientasinya. *Pertama*, posisi negara dan masyarakat (warga negara). Dalam pandangan Gramscian, negara ditempatkan di atas warga negara. Sedangkan di mata Giddens, negara dipandang sejajar dengan warga negara atau masyarakat. Secara eksplisit, Giddens (2000:91) menyebut negara sebagai ‘mitra’ masyarakat atau warga negara, yang saling memberi kemudahan dan saling mengontrol. Pemerintah dan rakyat hidup dalam informasi tunggal. *Kedua*, berkaitan dengan fungsi norma, ideologi, nilai dan kultur dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam pemikiran Gramsci, norma-norma politik, ideologi, kultural dan moral ditempatkan sebagai instrumen hegemoni. Sebaliknya, dalam teori strukturasi Giddens, norma-norma, ideologi, nilai dan aspek kultural dimasukkan dalam kerangka struktur, yang mampu membingkai praktik sosial. Masyarakat, dalam hal ini menyediakan ruang dan waktu bagi berlangsungnya praktik sosial yang dimaksud.

Bagaimana implikasi temuan penelitian dalam konteks kedua teori tersebut? dalam beberapa hal, dalam praktik budaya *macapatan* di Trenggalek membuktikan adanya aplikasi teori hegemoni Gramsci dan memperkuat konsepsi teori strukturasi Giddens. Sekalipun demikian, praktik hegemoni lewat budaya *macapatan* juga melemahkan hegemoni, lantaran adanya resistensi masyarakat seni dalam bentuk *tembang macapat* yang disusun oleh mereka yang bernada sebagai kritik sosial. Sedangkan dalam konteks teori strukturasi skemata dominasi hanya mampu menembus pada penguasaan atas orang (aspek politik) dan bukan atas barang (aspek ekonomi). Berbeda juga dengan teori hegemoni, kenyataan budaya di Trenggalek, justru menampakkan dimensi ekonomi yang tidak adil, lantaran munculnya eksploitasi tenaga kerja manusia yang tidak mendapatkan kontribusi ekonomik, dalam proyek sosialisasi P-4 secara nasional yang diduga memakan biaya yang besar. Secara demikian,

dalam konteks budaya *macapatan* di Trenggalek, kedua teori ini nampak saling mengisi. Atau kalau tidak, dalam menyongsong format Indonesia baru nanti, bisa diartikan sebagai perjalanan dari hegemoni (Gramsci) menuju strukturasi (Giddens). Posisi negara yang semula berada di atas warga negara, bergeser ke arah posisi kesejajaran antara keduanya.

SIMPULAN

Dengan mengacu pada permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus praktik budaya *macapatan* di Trenggalek terdapat praktik hegemoni negara Orde Baru, pada masa 'berkibarnya' yang lalu. Beberapa indikator praktik hegemoni negara Orde Baru terhadap budaya *macapatan* (budaya lokal) di Trenggalek, dapat diidentifikasi sekitar: (1) penerimaan campuran tangan elite pemerintah (BP-7) oleh elite seni setempat untuk membentuk kelompok *macapatan* P-4; (2) kegiatan 'Safari *Macapatan* P-4 ke seluruh desa-desa se-wilayah kabupaten Trenggalek; (3) penyiapan naskah *tembang*

macapat yang disusun oleh elite BP-7 Pusat, Jawa Timur dan elite seni setempat yang dipraktekkan dalam budaya *macapatan*; (4) kepatuhan aktif untuk menggunakan *tembang macapat* hasil rakitan elite-elite di atas; (5) tidak munculnya reaksi yang bersifat fisik dari masyarakat atau komunitas seni.

Kendati demikian, secara obyektif-ilmiah seharusnya dikritisi secara 'akomodatif', demokratif dan adil. Biarpun dalam praktik budaya *macapatan* nampak adanya praktik hegemoni negara Orde Baru, namun pada sisi lain perlu diakui bahwa pemerintah ini telah berbuat untuk masyarakat di Trenggalek, terutama dalam upaya membangkitkan kesadaran masyarakat seni terhadap pentingnya budaya *macapatan*. Pembentukan kelompok-kelompok budaya *macapatan* 'Pama-Pami' di desa-desa se-wilayah Trenggalek, menunjukkan adanya kepedulian negara (baca: pemerintah Orde Baru) terhadap pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi rakyat di daerah ini. Hanya sayangnya, dalam konteks pengembangan itu, muncul fungsi *latensi* yang mengarah pada legitimasi, kepentingan dan ideologi 'rezim berkuasa'.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiardjo, Miriam (ed). 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan.
- Cassell, Philip (ed). 1993. *The Giddens Reader*. Stanford, California. Stanford University Press.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta. P3B Depdikbud.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan* (Terjemahan Francisco Budi Hardiman). Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society (Outline of Theory of Structuration)*. Cambridge. Polity Press.
- . 1975. *Central Problem in Social Theory (Action, structure and contradiction in social analysis)*. London. MacMillian Education.
- . 2000. *The Thirt Way: Jala Ketiga Pembahasan Demokrasi Sosial*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia. Hatley, Berbara.
1990. "Theatre as Cultural Resistance in Contemporary in Indonesia". Dalam Arief Budiman (ed). *State And Civil Society In Indonesia*. (hlm. 267-280). Clayton. Victoria. Monash University.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmia Dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta. LP3ES.